

MEDIA PENDIDIKAN POLITIK: ANALISIS PERSPEKTIF PEMUDA DAN ALTERNATIFNYA DALAM KONTEKS COVID-19

Oki Anggara¹, Agus Rendra²

Tadris Bahasa Inggris, Institut Agama Islam Negeri Pontianak¹,
SMP Negeri 14 Bandung²

Email: oki.anggara@iainptk.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami media pendidikan politik seperti apa yang menarik dan dibutuhkan bagi pemuda agar substansi dan fungsi pendidikan politik berjalan seoptimal mungkin. Pandemi *Covid-19* yang terjadi beberapa tahun terakhir berdampak signifikan pada penyelenggaraan pendidikan politik sebagai konsekuensi logis dari pembatasan aktivitas di luar rumah. Media yang digunakan sebelum pandemi menjadi tidak optimal dalam membangun pemahaman politik. Hal ini membuat masyarakat (termasuk pemuda) memerlukan alternatif lain yang sesuai dengan kondisi pandemi. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan strategi eksplanatoris sekuensial. Partisipan dalam penelitian ini adalah pemuda, praktisi, dan ahli. Analisis data kuantitatif dilakukan secara statistik deskriptif dan kualitatif menggunakan analisis model Miles dan Huberman. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan politik dipandang sebagai suatu hal yang berkaitan dengan urusan-urusan negara oleh para pemuda saat ini. Dalam konteks pandemi *Covid-19*, media pendidikan politik yang dipandang menarik dan dibutuhkan bagi pemuda adalah media pendidikan politik yang tidak langsung, seperti media sosial yang memuat konten audio visual yang menarik, interaktif, terkini, dan ringan sehingga bisa menjangkau banyak pemuda secara luas dan lebih diminati. Selain itu, drama korea dipandang bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan politik.

Kata Kunci : Pendidikan Politik, Media Pendidikan Politik, Pemuda, Drama Korea, *Covid-19*

Abstract

This article aims at finding and figuring out what political education media is interesting and needed for youth so that the substance and function of political education can run as optimally as possible. The COVID-19 pandemic that has occurred in recent years has had a significant impact on the implementation of political education as a logical consequence of limiting activities outside home. The media used before the pandemic was not optimal in building political understanding. This makes the community (including youth) need other alternatives that are suitable for pandemic conditions. This study uses mixed methods with a sequential explanatory strategy. The participants in this study were youth, practitioners and experts. Quantitative data analysis was carried out using descriptive and qualitative statistics using the Miles and Huberman model analysis. The research findings showed that political education was seen as something related to state affairs by today's youth. In the context of the COVID-19 pandemic, political education media that is seen as interesting and needed for youth is indirect political education media, such as social media which contains interesting, interactive, up-to-date, and light audio-visual content so that it can reach many youth widely and more desirable. In addition, Korean drama is seen as an alternative media for political education.

Key Words : Political Education, Political Education Media, Youth, Korean Drama, COVID-19

PENDAHULUAN

Sejak munculnya kasus *Covid-19* pertama kali di Indonesia, pemerintah berupaya untuk mencegah penularan virus agar tidak meluas secepat mungkin. Salah satunya dengan imbauan Presiden Jokowi untuk belajar, bekerja dan beribadah di rumah.

Imbauan ini disampaikan pertama kali pada konferensi pers di Istana Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 [1]. Sementara itu, ditutupnya tempat rekreasi seperti pusat perbelanjaan, taman wisata, bioskop dan restoran membuat masyarakat mencari alternatif lain yang

bisa dijadikan hiburan meski sedang berada di rumah. Drama Korea menjadi alternatif pilihan bagi sebagian masyarakat Indonesia pada saat pandemi terjadi. Hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan 842 dari 924 responden atau setara 91,1% menonton drama Korea selama pandemi. Jumlah ini meningkat 3,3% dari sebelum pandemi. Bahkan 8% responden mengaku sebagai penonton baru. Ditinjau dari jenis kelamin, 92,6% penonton adalah perempuan. Dari seluruh responden yang mengaku menonton drama Korea, 41,3% di antaranya mengaku melakukannya lebih dari enam kali dalam seminggu. Durasi menonton pun turut meningkat dari rata-rata 2,7 jam per hari sebelum pandemi, menjadi 4,6 jam [2].

Fenomena maraknya industri film dan media dari negeri ginseng ini dikenal dengan istilah *hallyu* atau *korean wave* (gelombang budaya Korea). *Korean wave* terdiri dari beberapa konten kebudayaan yang menjadi salah satu komoditas ekspor utama bagi Korea Selatan, di antaranya yakni film, drama televisi (*K-drama*), musik (*K-pop*) dan *K-fashion*. Di Indonesia, *Korean wave* dapat diterima dengan lebih baik karena lebih kompatibel dengan nilai-nilai lokal dibandingkan dengan westernisasi [3]. Hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor geografis di mana Indonesia dan Korea Selatan sama-sama terletak di benua Asia dan cenderung memiliki kebudayaan yang sama dengan menganut budaya ketimuran. Melihat sejarah perkembangannya secara singkat, *hallyu* menjadi populer karena para jurnalis di Beijing banyak memberitakan tentang K-Pop dengan cepat. Berawal pada tahun 1997 ketika stasiun televisi *China's national China Central Television* (CCTV) menayangkan Drama Korea yang berjudul *What Is Love About*. Sehingga drama ini diputar ulang tahun 1998 karena

banyaknya permintaan [4]. Korea Selatan menguasai 2,7% pasar media dan hiburan global sepanjang tahun 2018, menempati posisi kedelapan. Hal ini terjadi berkat adanya dukungan pemerintah terhadap industri media dan hiburan dengan berbagai kebijakan dan membangun Badan Konten Kreatif Korea (KOCCA). Badan ini bertugas mempromosikan industri media dan hiburan yang terintegrasi dengan Institut Penyiaran Korea, Badan Konten dan Budaya, serta Badan Gim Korea [5]. Kondisi inilah yang menjadikan ekosistem media dan hiburan di Korea Selatan kuat dan mampu menjangkau pasar global.

Kelanjutan dari globalisasi ekonomi dan budaya ini mengarah pada kecenderungan pemuda sebagai pencipta dan konsumen budaya populer, terutama pada pemuda urban yang relatif kaya di kawasan metropolitan [6]. Pemuda sebagai pilar bangsa diharapkan masyarakat untuk menjalankan status dan perannya dengan optimal, berjiwa nasionalis, dan memiliki ketahanan diri dalam pengaruh globalisasi [7]. Mengingat realitas yang saat ini terjadi, jumlah pemuda di tahun 2021 mencapai 23,90% total penduduk Indonesia atau setara dengan 64,92 juta jiwa [8]. Fenomena ini tentunya bisa dipandang sebagai peluang kerja sama ataupun tantangan bagi ketahanan nasional Indonesia, sehingga diperlukan adanya kajian akademis secara lebih mendalam terhadap beberapa genre film atau *TV series* yang dipandang kritis bisa mengganggu stabilitas kehidupan politik bagi warga negara atau justru sebaliknya, memberikan pencerahan atau ide baru. Media berada dalam posisi yang strategis pada masa modernisasi dan globalisasi saat ini. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang begitu cepat, membuat banyak orang menggunakan dan menghabiskan waktu dengan media. Media bisa dipahami sebagai alat (sarana)

komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk [9]. Dalam konteks pendidikan politik, media pendidikan politik bisa menjadi alat yang promotif dan strategis yang biasanya digunakan oleh pelaku politik untuk menarik kepercayaan atau menimbulkan keberpihakan [10]. Pengaruh media dalam indoktrinasi politik jelas mengkhawatirkan publik, karena bisa mengontrol pandangan politik masyarakat. Indoktrinasi memaksa individu untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat demokrasi. Media digital seperti gambar, video dan rekaman suara sering digunakan sebagai alat untuk mengajak pemilih [11]. Media pendidikan politik semestinya bisa digunakan dengan bijak untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Selain itu, media pendidikan politik yang ideal adalah media yang bisa menerapkan *civic literacy* yakni pengetahuan dan kemampuan warga dalam mengatasi masalah-masalah sosial, politik dan kenegaraan [12]. Menanggapi fenomena tersebut, penting bagi civitas akademika atau peneliti untuk mengetahui dan memahami media pendidikan politik seperti apa yang menarik dan dibutuhkan bagi pemuda agar substansi dan fungsi pendidikan politik berjalan seoptimal mungkin khususnya dalam konteks darurat seperti pada saat terjadi Pandemi *Covid-19*. Sesulit apapun, pendidikan harus tetap berjalan, termasuk dalam pendidikan politik.

Pandemi menghadirkan berbagai keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan politik. Namun sejatinya pemerintah dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan politik, perlu beradaptasi dan mengikuti perspektif pemuda serta mengkaji alternatif yang bisa dilakukan dengan efektif. Hal tersebut memberi ketertarikan kepada peneliti untuk melakukan mengkaji lebih lanjut dalam

rangka mendorong penguatan pendidikan politik pada kondisi *Covid-19*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau kombinasi (*mix method*) yang menggabungkan antara kuantitatif dengan kualitatif melalui strategi eksplanatoris sekuensial. Kombinasi tersebut dimulai dari tahapan pengumpulan data, analisis data, dan penyajian data. Penelitian dilakukan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi) yang merupakan kawasan megapolitan di Indonesia. Jabodetabek dipertimbangkan sebagai lokasi penelitian karena kompleksitas dan beragamnya latar belakang sosial dan budaya masyarakatnya, sehingga data yang akan didapatkan menjadi lebih komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan angket atau kuesioner. Jenis angket yang akan digunakan pada penelitian ini adalah angket tertutup berupa pilihan ganda. Kemudian wawancara, studi dokumentasi, dan studi literatur. Ada 71 orang responden pemuda dengan rentang usia 16-30 tahun yang terlibat dalam penelitian ini, termasuk lima orang pemuda sebagai informan yang bersedia untuk diwawancara secara mendalam. Dua orang guru di tingkat Sekolah Menengah Atas dan dua orang peneliti yang memiliki bidang keahlian media, budaya pop Korea dan komunikasi politik.

Analisis data kuantitatif dilakukan secara statistik deskriptif yaitu untuk menjelaskan fenomena pemanfaatan media pendidikan politik pada masa pandemi. Sedangkan analisis data kualitatif yang digunakan adalah analisis model Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa langkah, di antaranya yaitu reduksi data, penarikan kesimpulan, triangulasi data dan *member check* untuk menjawab media pendidikan politik dalam perspektif pemuda dan alternatifnya dalam konteks *Covid-19*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 menunjukkan profil demografi responden. Responden perempuan (84,5%) lebih banyak daripada responden laki-laki (15,5%). Kemudian, sebagian besar responden berdomisili di DKI Jakarta (29,6%) dan paling sedikit berdomisili di Depok (11,3%). Usia responden didominasi oleh dewasa awal yaitu dari rentang 20 - 24 tahun sebanyak (39,5%).

Tabel 1. Demografi Responden

<i>Jenis Kelamin</i>	
Laki-Laki	15,5%
Perempuan	84,5%
<i>Domisili</i>	
DKI Jakarta	29,6%
Bogor	22,5%
Depok	11,3%
Tangerang	18,3%
Bekasi	18,3%
<i>Usia</i>	
16 – 19	22%
20 – 24	39,5%
25 – 30	38,5%

Dari 71 responden yang telah mengisi angket, ada 23 responden yang bersedia untuk diwawancarai, kemudian peneliti memilih lima pemuda yang dapat mewakili berbagai latar belakang responden pada angket seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan domisili.

Tabel 2. Profil Informan Pemuda

Inisial	Usia dan Gender	Profesi	Domisili
A (CS)	18 P	Pelajar	Jakarta
B (AH)	23 P	Mahasiswa	Bogor
C (SB)	26 P	Karyawan Swasta	Depok
D (MI)	23 P	Mahasiswa	Tangerang
E (RA)	29 L	Karyawan Swasta	Bekasi

Tabel 3. Profil Informan Praktisi & Ahli

Inisial	Gender	Profesi	Domisili
F (GD)	P	Guru PPKn	Bogor
G (DR)	L	Guru PPKn	Jakarta
H (RR)	P	Peneliti	Jakarta
I (P)	P	Dosen	Jakarta

Dalam menganalisis bagaimana perspektif pemuda terhadap pendidikan politik dalam konteks pandemi *Covid-19*, peneliti telah menyebarkan kuesioner yang berisi enam pernyataan berikut:

Tabel 4. Perspektif Pemuda terhadap Pendidikan Politik

<i>Pernyataan</i>	<i>Ya</i>	<i>Tidak</i>
Saya dapat menjelaskan makna pendidikan politik.	62%	38%
Saya memahami tujuan dari pendidikan politik.	80,3%	19,7%
Saya pernah mengikuti praktik pendidikan politik.	23,9%	76,1%
Pendidikan politik sangat penting bagi warga negara.	98,6%	1,4%
Saya memahami Pendidikan politik dengan baik.	38%	62%
Saya dapat menyebutkan bentuk-bentuk media Pendidikan politik.	43,7%	56,3%

Hasil menunjukkan bahwa 62% atau 44 dari responden memahami dan menganggap bahwa dirinya mampu menjelaskan makna pendidikan politik. Berdasarkan hasil wawancara, informan A (CS) menjelaskan bahwa pendidikan politik ialah pendidikan yang berkaitan dengan urusan-urusan negara. Informan E (RA), informan C (SB) dan informan B (AH) menjelaskan bahwa pendidikan politik adalah wawasan yang penting untuk setiap anak karena tidak akan lepas dari kehidupan politik. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman masyarakat terkait kondisi perpolitikan sebuah negara, baik mengenai negara, bentuk negara, kekuasaan, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Praktisi Pendidik, informan F (D) dan informan G (DR) menjelaskan bahwa pendidikan politik ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh para pemuda yaitu pendidikan yang mengajarkan karakter dan nilai-nilai politik kepada peserta didik untuk berpikir kreatif, kritis dan rasional terhadap kondisi negara. Pendidikan politik memiliki makna yang penting dalam perkembangan masyarakat

untuk menjadikannya lebih beradab yang dilandasi oleh prinsip demokrasi [13].

Pendidikan politik adalah gabungan dua konsep berbeda yang saling berkaitan, yaitu pendidikan dan politik. Pendidikan mengarah pada definisi umum berkaitan dengan segala upaya untuk mengembangkan kemampuan sikap dan berbagai bentuk tingkah laku dalam masyarakat. Sedangkan politik diinterpretasikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, kebijakan publik, pengambilan keputusan serta alokasi dan distribusi. Namun pendidikan politik didefinisikan lebih luas dari itu dan mengarah pada interpretasi tentang pendidikan orang dewasa yang diarahkan dalam upaya membina kompetensi untuk mengaktualisasi diri secara bebas dan otonom dalam kehidupan sosial sebagai warga negara.

Berkaitan dengan tujuan pendidikan politik, 80,3% responden memahami pentingnya pendidikan politik. Informan yang berasal dari kalangan pemuda dan praktisi setidaknya menjelaskan beberapa manfaat mempelajari pendidikan politik, yaitu:

1. Mengetahui kondisi politik dan berbagai realitasnya.
2. Memahami pengaruh dan dampak politik dalam segi-segi penting kehidupan masyarakat.
3. Melek/sadar terhadap pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan publik.
4. Tidak diperalat oleh orang-orang yang berpolitik.
5. Memahami relasi/interaksi antara pemerintah dan warga negara.
6. Mampu dan bijak dalam memilih orang yang tepat untuk menduduki kursi pemerintahan.

Berdasarkan pandangan ahli, yaitu informan H (RR) menjelaskan tujuan belajar politik itu adalah untuk *learn*.

Dengan belajar pendidikan politik, kita menjadi lebih peduli terhadap situasi negara. Anak muda menjadi *goalkeeper* yang memberikan kritikan bagi pemerintah. Apabila anak mudanya sudah tidak peduli untuk turun ke jalan, maka kita patut mempertanyakan demokrasi. Merujuk pada Pasal 31 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, tujuan pendidikan politik di antaranya yaitu [14]:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Berikutnya data menunjukkan bahwa 75% responden pernah mengikuti praktik pendidikan politik. Adanya kesadaran tentang tujuan berbanding lurus dengan hasil dari pertanyaan pentingnya pendidikan politik dimana 98,6% responden meyakini bahwa pendidikan politik sangat penting untuk dipelajari warga negara. Alasannya seperti yang dikemukakan oleh informan C (SB), informan A (CS), dan informan E (RA) bahwa pentingnya pendidikan politik adalah agar kita mampu mendorong pengambilan keputusan yang baik dalam pemerintahan, meningkatkan kepekaan terhadap isu politik, serta memahami proses penyusunan kebijakan publik. Penguatan urgensi ini juga disampaikan oleh informan G (DR) dan informan F (D) yang berpendapat bahwa pendidikan politik penting dipahami agar pemuda bisa mengambil peran dalam proses penentuan kebijakan publik dengan bermodalkan pemikiran kritis, kreatif, dan rasional. Dua temuan masalah yang mendorong

penguatan pada penelitian ini adalah bahwa hanya 38% responden yang memahami pendidikan politik dengan baik. Sisanya (62%) tidak merasa memahami pendidikan politik dengan baik. Di samping itu (56,3%) dari responden tidak mampu menyebutkan bentuk-bentuk media pendidikan politik. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara, empat dari lima responden yang dijadikan informan mampu menjelaskan bentuk-bentuk media pendidikan politik. Adapun bentuk media yang para informan pemuda jelaskan meliputi media daring seperti media sosial, video, blog, *website*, dan televisi. Sedangkan bentuk lainnya berupa media luring seperti *sticker*, baliho, forum nonformal, forum resmi dari pemerintah, media jurnalistik, dan diskusi dalam lingkup keluarga.

Tabel 5. Perspektif Pemuda terhadap Media Pendidikan Politik pada Masa Pandemi

<i>Pernyataan</i>	<i>Ya</i>	<i>Tidak</i>
Media pendidikan politik yang saat ini didapatkan, sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pemuda.	71,8%	28,2%
Media pendidikan politik yang tidak langsung, dibutuhkan pada kondisi pandemi.	91,5%	8,5%
Saya memiliki minat yang tinggi dalam menonton drama korea.	94,4%	5,6%
Saya mampu memaknai pendidikan politik melalui drama korea.	90,1%	9,9%
Drama korea bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan politik di masa pademi.	93%	7%

Hasil menunjukkan bahwa 71,8% atau 51 responden menganggap bahwa media pendidikan politik yang saat ini didapatkan sudah sesuai dengan kebutuhan pemuda. Dari lima informan yang diwawancarai lebih lanjut, dua informan (A (CS) dan D (MI)) menyatakan bahwa media

pendidikan politik saat ini sudah bisa digunakan atau sesuai kebutuhan. Dua informan lain (B (AH) dan C (SB)) menyatakan sebaliknya, yaitu belum secara keseluruhan karena masih ada kebingungan dari informasi yang ada. Sedangkan satu orang informan (E (RA)) berikutnya bersifat netral karena beranggapan bahwa konten tentang politik masih sedikit.

Dalam kondisi pandemi, 91,5% atau 65 responden menyatakan bahwa media pendidikan politik yang dibutuhkan adalah media pendidikan politik yang tidak langsung, seperti media sosial yang memuat konten audio visual yang menarik, interaktif, terkini, dan ringan sehingga bisa menjangkau banyak pemuda secara luas dan lebih diminati. Selain media sosial sebagai media utama yang digemari oleh pemuda, peneliti mencoba untuk menanyakan salah satu alternatif media lainnya yaitu menonton film. Hasil survei yang dilakukan *Alvara Research Center* menunjukkan bahwa penggunaan internet melonjak di masa pandemi *Covid-19*. Sebanyak 82,7% responden menghabiskan waktu untuk bermedia sosial, 75,1% berselancar di internet, dan 57,8% menonton film [15]. Film bisa digunakan dalam beberapa fungsi dalam suatu program belajar dan optimal jika sesuai dengan gaya mengajar, tujuan pembelajar dan topik pembelajaran. Fungsi film di antaranya yaitu: sebagai analisis kasus; latihan pengalaman; perumpamaan atau perbandingan; sindiran atau kritik sosial; simbolisme; arti atau pemaknaan; pengalaman; dan waktu [16].

Pemuda memiliki minat yang tinggi dalam menonton drama korea, hasil menunjukkan ada 67 responden atau 94,4% yang berminat terhadap drama korea. Informan (A (CS) berpandangan bahwa minat yang tinggi ini terjadi karena drama korea mampu menjelaskan konsep dan istilah

yang belum diketahui sebelumnya. Kemudian informan C (SB) menyatakan semenjak pandemi, minat terhadap drakor cukup tinggi. Selain itu informan E (AH) justru sudah diperkenalkan sejak dari kecil oleh keluarganya. Para pemuda juga mampu untuk memaknai pendidikan politik melalui drama korea dengan persentase sebanyak 90,1% dan 93% beranggapan bahwa drama korea bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan politik di masa pandemi. Pembelajaran tentang politik melalui drama korea tentunya dipandang tidak bisa didapatkan begitu saja oleh para pemuda, mereka menganalisis bahwa perlu ada pemilihan genre dramanya terlebih dahulu. Informan E (RA) dengan tegas jelas mengutarakan bahwa kita bisa belajar tentang politik misalnya melalui drama korea *Vagabond* yang sesuai dengan kondisi politik sekarang yaitu adanya istilah atau sebutan “naga sembilan” untuk salah satu tokoh yang ternyata tidak bisa disentuh oleh hukum. Selanjutnya informan C (SB) juga menyebutkan beberapa contoh drama korea yang dianggap bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan politik, di antaranya yaitu *Reply 1998* (pendidikan politik di keluarga, relasi pemerintah dan pemuda/warga negara), *2521* (ada di bagian krisis moneter, perubahan kondisi sosial), *Vagabond* (relasi kekuasaan dan *money talk*), dan *Law School*. Hal ini senada dengan informan B (AH) yang berpendapat bahwa drama-drama korea tidak melulu tentang percintaan, tapi juga mengemas hal-hal seperti politik, kriminalitas dan lain-lain.

Peneliti Bidang Komunikasi dan Budaya Pop (H (RR)) menyatakan bahwa drama korea bisa dijadikan sebagai alternatif media pendidikan politik namun harus memperhatikan konteksnya karena film lebih banyak muatan fiksi daripada realitasnya. Jangan dianggap sebagai

kebenaran sejarah, karena bisa berbeda-beda. Drama korea tidak hanya bisa dijadikan sebagai pendidikan politik, melainkan isu *mental health*, *bullying*, *competitiveness* pendidikan di Korea. Dalam konteks politik, drama korea ada yang cenderung membahas relasi politik antara korea utara dan selatan. Sedangkan Dosen bidang Komunikasi Politik (I (P)) berpandangan bahwa dijadikannya drama korea sebagai alternatif media pendidikan politik tetap memerlukan pengarahannya dari guru supaya ada relevansi dengan bahan ajar. Guru memandu siswa untuk menarik relevansi film dengan materi ajar dan membantu siswa menginterpretasinya. Pernyataan dari kedua ahli pun didukung oleh para praktisi (F (D) dan G (DR)) yang berpendapat bahwa media pendidikan politik salah satunya bisa digunakan melalui film. Dalam drama korea bisa dibuat khusus tentang pendidikan politik misalnya adegan korupsi, kebijakan, hak warga negara, hak pejabat pemerintah.

SIMPULAN

Pendidikan politik dipandang sebagai suatu hal yang berkaitan dengan urusan-urusan negara oleh para pemuda saat ini, yang di dalamnya berisikan konsep kenegaraan, kewajiban dan hak warga negara, karakter dan nilai-nilai yang bertujuan untuk berpikir kreatif, kritis dan rasional terhadap kondisi negara. Dalam konteks pandemi COVID-19, media pendidikan politik yang dipandang menarik dan dibutuhkan bagi pemuda adalah media pendidikan politik yang tidak langsung, seperti media sosial yang memuat konten audio visual yang menarik, interaktif, terkini, dan ringan sehingga bisa menjangkau banyak pemuda secara luas dan lebih diminati.

Terdapat beberapa alternatif yang dapat digunakan sebagai media pendidikan politik, yang salah satunya adalah drama korea dengan genre tertentu. Pemuda berpandangan bahwa drama korea mampu

menjelaskan konsep dan istilah yang belum diketahui sebelumnya serta beberapa adegan atau cuplikan yang dijadikan alternatif media pendidikan politik cukup relevan dengan kondisi perpolitikan suatu negara. Namun dalam pelaksanaannya tetap memerlukan pengarahannya dari pendidik supaya ada relevansi dengan bahan ajar sekaligus memastikan bahwa sifat fiksi dari film tidak dijadikan sebagai kebenaran mutlak. Pendidik memandu peserta pendidikan politik untuk menarik relevansi film dengan materi ajar dan membantu siswa menginterpretasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Ihsanduddin, "Jokowi: Kerja dari Rumah, Belajar dari Rumah, Ibadah di Rumah Perlu Digencarkan," 2020 [Online] Tersedia: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/16/15454571/jokowi-kerja-dari-rumah-belajar-dari-rumah-ibadah-di-rumah-perlu-digencarkan?page=all>, [Diakses 28 Desember 2022]
- [2] R. Rastati, W. Wahyudi, A. M. Ratri, dan S. M. Nadila, "Survey Result: K-Drama Consumption Amidst COVID-19 Pandemic in Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 11, no. 16, Jan. 2021. [Online] Tersedia: <http://lipi.go.id/publikasi/survey-result-k-drama-consumption-amidst-covid-19-pandemic-in-indonesia/39673>
- [3] D. Larasati, "Globalization on Culture and Identity: Pengaruh dan Eksistensi Hallyu (Korean-Wave) Versus Westernisasi di Indonesia," *Jurnal Hubungan Internasional*, vol. 11, no. 1, p. 109, Nov. 2018, doi: 10.20473/jhi.v11i1.8749.
- [4] W. A. Muhammad, "The Hallyu (The K-Pop/Korean Pop Waves) Phenomenon and Its Impacts in Indonesia," *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 13, no. 1, pp. 201–212, 2013.
- [5] Y. Pusparisa, "Berkah Ekonomi Korea dari Demam Drakor Saat Pandemi," 2020 [Online] Tersedia: <https://katadata.co.id/muhammadridh/oi/analisisdata/5fc1e1a0e4d3d/berkah-ekonomi-korea-dari-demam-drakor-saat-pandemi>, [Diakses 28 Desember 2022].
- [6] S. Naafs and B. White, "Intermediate Generations: Reflections on Indonesian Youth Studies," *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, vol. 13, no. 1, pp. 3–20, Feb. 2012, doi: 10.1080/14442213.2012.645796.
- [7] O. Anggara, "Partisipasi Sosial Pemuda dan Implikasinya terhadap Nasionalisme," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 10, no. 1, p. 61, Jun. 2022, doi: 10.37064/jpm.v10i1.11169.
- [8] N. R. Sari, *et al.*, "Statistik Pemuda Indonesia Tahun 2021," 2021. [Online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/21/52333d2ce0a748fff6469811/statistik-pemuda-indonesia-2021.html> [Diakses 29 Desember 2022]
- [9] I. R. Karo-Karo dan R. Rohani, "Manfaat Media dalam Pembelajaran," *AXIOM: Jurnal Pendidikan dan Matematika*, vol. 7, no. 1, Jun. 2018, doi: 10.30821/axiom.v7i1.1778.
- [10] K. Bashori, "Pendidikan Politik di Era Disrupsi," *Sukma: Jurnal Pendidikan*, vol. 2, no. 2, pp. 287–310, Dec. 2018, doi: 10.32533/02207.2018.
- [11] B. Arianto, "Kampanye Kreatif dalam Kontestasi Presidensial 2014," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 19, no. 1, p. 16, Apr. 2016, doi: 10.22146/jsp.10854.
- [12] R. Raharjo, A. Armawi, dan D. Soerjo, "Penguatan Civic Literacy

- dalam Pembentukan Warga Negara yang Baik (Good Citizen) dan Implikasinya terhadap Ketahanan Pribadi Warga Negara Muda (Studi tentang Peran Pemuda HMP PPKn Demokratia pada Dusun Binaan Mutiara Ilmu di Jebres, Surakarta, Jawa Tengah),” *Jurnal Ketahanan Nasional*, vol. 23, no. 2, p. 51, Aug. 2017, doi: 10.22146/jkn.26457.
- [13] D. Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Bogor: Guepedia, 2019.
- [14] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. Indonesia: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2008_2.pdf, 2008.
- [15] D. H. Jayani, “Survei Alvara: Sosial Media Jadi Hiburan Favorit selama Beraktivitas di Rumah,” 2020 [Online]. Tersedia: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/10/02/survei-alvara-sosial-media-jadi-hiburan-favorit-selama-beraktivitas-di-rumah>, [Diakses 29 Desember 2022]
- [16] J. E. Champoux, “Film as a Teaching Resource,” *Journal of Management Inquiry*, vol. 8, no. 2, pp. 206–217, Jun. 1999, doi: 10.1177/105649269982016.